

### **Peran UN Women dalam Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan di Liberia Tahun 2019-2021**

#### *UN Women's Role in Empowering Women's Political Participation in Liberia 2019-2021*

**Fatimah Shyta Ramadhanty**  
Universitas Al-Azhar Indonesia  
Email: shytaaramadhanty@gmail.com

Diterima 15 Januari 2024 | Direvisi 19 Februari 2024 | Diterbitkan 20 Maret 2024

#### **ABSTRACT**

*Empowering women is one of the global goals proclaimed by many countries in the world today. There are still a number of women in various countries who have limited movement because the country's culture is still conservative and traditional. Politics is considered not a suitable area for women to play, making it difficult for women to access the world of politics. Liberia is one of the countries in West Africa that has challenges related to women's political participation. The low political participation of women means that it is still difficult for women in Liberia to achieve women's empowerment. Economic factors and women's education are low, and the Liberian Law which does not apply gender quotas is a factor for women's political participation in Liberia is low. In this case, UN Women as an international organization is here to help women in Liberia in their efforts to empower women. Thus, the formulation of the problem in this research is "How does UN Women play a role in increasing women's political participation in Liberia in 2019-2021?". This study uses qualitative methods to understand and explain the role of UN Women in contributing to women's political participation in Liberia. UN Women played an important role in providing technical and financial assistance to Liberia, and also played a role in the amendment to the 30% gender quota law for women. Even though the quota amendment was only successfully approved by the DPR, this is the first step for the successful implementation of women's empowerment in Liberia.*

**Keywords:** Africa, Feminism, Liberia, UN Women, Women Empowerment

#### **ABSTRAK**

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu tujuan global yang dicanangkan oleh banyak negara di dunia saat ini. Masih ada beberapa perempuan di berbagai negara yang memiliki keterbatasan atas pergerakannya karena budaya negaranya yang masih konservatif dan tradisional. Politik dinilai bukan area yang cocok dimainkan oleh perempuan sehingga membuat perempuan sulit untuk mengakses dunia politik. Liberia merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang memiliki tantangan terkait partisipasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan yang rendah menyebabkan perempuan di Liberia masih sulit untuk mencapai pemberdayaan perempuan. Faktor ekonomi dan pendidikan

perempuan yang rendah, dan Undang-Undang Liberia yang tidak menerapkan kuota gender menjadi faktor partisipasi politik perempuan di Liberia rendah. Dalam hal tersebut, *UN Women* selaku organisasi internasional hadir untuk membantu perempuan di Liberia dalam upaya pemberdayaan Perempuan. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan “Bagaimana *UN Women* berperan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Liberia pada tahun 2019-2021?”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami, dan menjelaskan mengenai peran *UN Women* dalam memberikan kontribusinya bagi partisipasi politik perempuan di Liberia. *UN Women* berperan penting dalam memberikan bantuan secara teknis dan keuangan terhadap Liberia, dan juga berperan terhadap amandemen Undang-Undang kuota gender 30% perempuan. Walaupun amandemen kuota tersebut hanya berhasil disahkan oleh DPR, namun hal tersebut menjadi langkah awal atas keberhasilan penerapan pemberdayaan perempuan di Liberia.

**Kata kunci:** Afrika, Feminisme, Liberia, Pemberdayaan Perempuan, UN Women

## PENDAHULUAN

Permasalahan pemberdayaan perempuan masih menjadi salah satu isu hangat di berbagai negara. Seiring berjalannya waktu yang semakin modern, banyak perempuan mulai berani menyoal hak-hak dan menyerukan berhenti diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi yang sering dialami perempuan disebabkan oleh budaya patriarki yang membuat perempuan terbatas dalam melakukan pergerakannya. Walaupun di dunia ini banyak penggerak pemberdayaan perempuan melakukan kampanye, banyak pemerintah negara-negara yang meluncurkan peraturan terhadap negaranya untuk pemberdayaan perempuan, serta hadirnya organisasi internasional yang membantu pemberdayaan perempuan, nyatanya masih ada negara yang sulit dalam pemenuhan pemberdayaan perempuan.

Salah satu bidang pemberdayaan perempuan yang pemenuhannya masih sulit adalah partisipasi politik perempuan. Seperti yang tertuang dalam catatan Resolusi Majelis Umum PBB (2011) yang menyatakan, “*women in every part of the world continue to be largely marginalized from the political sphere, often as a result of discriminatory laws, practices, attitudes and gender stereotypes, low levels of education, lack of access to health care and the disproportionate effect of poverty on women*” (United Nations, 2012).

Dengan memiliki 49,7% penduduk perempuan dan 50,3% penduduk laki-laki dari total populasi sebesar 5,05 juta pada tahun 2020, Liberia memiliki beberapa faktor yang menjadi tantangan terhadap partisipasi politik perempuan. Faktor yang paling utama merupakan faktor pendidikan, mengingat pada tahun 2019 hanya 31% perempuan yang

mengenyam pendidikan dasar dan 36% perempuan yang berhasil menempuh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang menyebabkan sepertiga penduduk perempuan Liberia tidak dapat menempuh pendidikan, ditambah hanya pendidikan dasar yang wajib ditempuh. Angka melek huruf perempuan di Liberia juga rendah yang membuat sulit untuk memiliki kesempatan dalam berbagai bidang (Letouzé et al., 2021).

Faktor ekonomi juga memengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan rendah, keadaan kesenjangan upah, pekerjaan yang tidak dibayar, dan pengangguran membuat perempuan ditempatkan sebagai pengecualian untuk bisa mendapatkan akses dalam berbagai bidang dan membuat perempuan Liberia kurang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ditambah dengan masih hadirnya budaya Liberia yang memberikan kesan bahwa perempuan di Liberia hanya boleh di rumah dan tidak boleh bekerja. Faktor perekonomian menjadi tonggak awal perempuan Liberia sulit mendapatkan akses ke pendidikan, karena adanya kesenjangan kekayaan membuat pendidikan hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki perekonomian baik. Pandemi COVID-19 juga menempatkan perempuan Liberia dalam kesulitan. Secara umum, mereka bekerja dengan gaji yang rendah dan tidak memiliki perlindungan (asuransi sosial). Kerugian tersebut menjadikan perempuan Liberia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka (Letouzé et al., 2021).

Budaya tradisional di Liberia masih mendominasi kehidupan sosial masyarakatnya. Banyak keluarga Liberia dari ekonomi rendah berbondong-bondong untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia yang sangat dini. Walaupun gerakan kampanye untuk berhenti melakukan pernikahan anak telah diselenggarakan, hal tersebut tidak menjadi kemajuan negara Liberia untuk terhindar dari budaya yang mengakar kuat tersebut (Letouzé et al., 2021).

Meskipun Liberia telah berhasil mengangkat presiden perempuan pertama di Afrika pada tahun 2005 yaitu Ellen Johnson Sirleaf dan mengangkat Jewel Taylor sebagai wakil presiden perempuan pertama di Liberia tahun 2017, perempuan di Liberia masih rendah keterwakilannya di politik. Bisa digambarkan pada tahun pemilihan umum 2017, perempuan Liberia menduduki 9 kursi dari total 73 kursi di DPR. Dan pada pemilihan senator khusus tahun 2020, perempuan Liberia menduduki 2 kursi dari total 30 kursi senat. (IDEA, 2022). Dalam hal tersebut, Liberia tidak mengalami peningkatan terhadap partisipasi perempuan di

parlemen, karena pada tahun pemilihan umum sebelumnya yang diselenggarakan pada tahun 2011, tercatat hanya sebesar 11% perempuan yang menduduki kursi parlemen. Perempuan Liberia menduduki 8 kursi dari total 65 kursi di DPR (IPU, 2011a). Perempuan Liberia juga hanya berhasil menempati 1 kursi dari total 15 kursi senat (IPU, 2011b).

Faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan di Liberia rendah adalah tidak diterapkannya kuota partisipasi politik perempuan dalam Undang-Undang negara Liberia (Laubach, 2021). Sementara itu, dalam resolusi PBB tercantum bahwa kuota partisipasi perempuan setidaknya 30%, sesuai dengan Resolusi 1990/15 Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (1990) yang menyatakan, “*governments, political parties, trade unions and professional and other representative groups should each aim at targets to increase the proportion of women in leadership positions to at least 30 percent by 1995, with a view to achieving equal representation between women and men by the year 2000, and should institute recruitment and training programs to prepare women for those positions*” (United Nations, 1990).

Faktor-faktor diatas merepresentasikan diskriminasi yang dialami oleh perempuan Liberia sehingga sulit dalam mengakses keterwakilannya dalam politik. Hadirnya *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau yang dikenal sebagai *UN Women* membantu perempuan Liberia dalam pemberdayaan perempuan sekaligus mempromosikan kesetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan “bagaimana *UN Women* berperan dalam partisipasi politik perempuan di Liberia pada tahun 2019-2021?”. Serta memiliki tujuan untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah tersebut dengan cara eksplanatif mengenai partisipasi politik perempuan di Liberia dan menganalisis bagaimana peran *UN Women* selaku organisasi internasional dalam upaya membantu Liberia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang partisipasi politik perempuan melalui pelaksanaan program-programnya.

Adapun penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas perempuan di Liberia namun berbeda dalam bidang kajiannya menjadi salah satu bahan perspektif dalam penelitian ini. Salah satu penelitian sebelumnya merupakan jurnal yang disusun oleh Sali Hafe, Bob Mwiinga Muniyati, Katie Zeno, Catherine K Z Gbozee, Mbalu Jusu1, Mantue S. Reeves, C SanfordWesseh, S Olasford Wiah, Mohammed AlKhaldi, Kristin Johnson and Marion Subah

yang dipublikasikan pada tahun 2022 dengan judul “*Examining the gender imbalance in the National Community Health Assistant Programme in Liberia: a qualitative analysis of policy and Programme implementation*” yang membahas bagaimana kondisi perempuan di Liberia yang mengalami kesenjangan gender dalam lingkup Asisten Kesehatan Masyarakat karena hanya 17% perempuan yang terlibat. Penelitian pada jurnal ini memiliki tujuan untuk membahas bagaimana kesenjangan gender yang dialami oleh perempuan di Liberia yang memberikan dampak tidak menguntungkan bagi perempuan di Liberia karena sulit untuk mendapatkan akses dalam pencalonan dan pemilihan sebagai Asisten Kesehatan Masyarakat. Jurnal ini juga bertujuan dalam memberikan pemahaman bagaimana pendidikan menjadi salah satu syarat penting saat menjadi Asisten Kesehatan Masyarakat dan ini merupakan pertanda buruk bagi perempuan Liberia yang disebabkan oleh keterbatasan pendidikan perempuan Liberia akibat dari sosial budaya Liberia yang kurang responsif gender. Kemudian, penelitian dalam jurnal ini juga membahas Program Bantuan Kesehatan Masyarakat Nasional di Liberia pada tahun 2016–2021 tidak responsif terhadap gender sehingga membuat program yang dijalankan tentunya tidak responsif gender (Hafez et al., 2022). Dalam hal tersebut, faktor rendahnya pendidikan menjadi penyebab dari rendahnya keterwakilan perempuan untuk menjadi Asisten Kesehatan Masyarakat, hal tersebut juga berkaitan dengan penelitian ini yang memiliki faktor yang sama, yaitu rendahnya pendidikan menjadi hambatan bagi para perempuan di Liberia untuk memasuki area politik.

## **KERANGKA TEORI**

### **Feminisme Fungsional**

Feminisme merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengedepankan posisi perempuan guna mencapai hak-hak yang biasanya hanya didominasi oleh laki-laki (Offen, 1988). Feminisme juga membuka pandangan baru terhadap kaum perempuan yang menghadirkan pola pikir baru adanya kesetaraan gender yang mengacu pada sebuah perwujudan praktik maupun secara teoritis untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan. Feminisme hadir seringkali untuk menjawab berbagai persoalan yang ditandai dengan rendahnya keterwakilan perempuan, dominasi laki-laki di berbagai bidang dan perspektif bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan sehingga lemahnya perempuan menjadi stereotype umum, dan adanya beberapa peristiwa atau fenomena membuat perempuan terhambat dan sering dikesampingkan (Hadiwinata, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan feminisme fungsional. Feminisme fungsional merupakan sebuah landasan untuk memperkenalkan istilah “inklusif” bagi perempuan dan laki-laki sehingga hadir sebuah kecerahan dan saling mendapatkan tempat di dalamnya. Feminisme fungsional tidak hanya dikenal dalam mempromosikan tentang karir (dalam berbagai bidang seperti contoh ekonomi, sosial, dan pendidikan), namun juga menjelaskan bagaimana peran perempuan dalam lingkup keluarga yang masih tradisional dan masih menanamkan nilai konservatif karena feminisme fungsional dinilai sebagai feminisme modern yang membangun harga diri gender lebih maju serta mendorong kehidupan yang seutuhnya (Brooks, 2021).

Keterkaitan feminisme fungsional dalam penelitian ini adalah *UN Women* sebagai sebuah instrumen penggerak dari feminisme fungsional yang memasuki Liberia untuk membantu dalam mencapai pemenuhan partisipasi politik perempuan akibat dari partisipasi politik perempuan di Liberia yang rendah. *UN Women* juga berfungsi untuk memberikan pendidikan politik untuk perempuan Liberia dengan memberikan pendekatan feminisme agar terciptanya semangat dan kesadaran bagi perempuan Liberia untuk terjun ke ranah politik. *UN Women* juga berfungsi untuk membantu perempuan Liberia terkait kuota gender 30% untuk perempuan dalam Undang-Undang agar terciptanya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan politik perempuan.

Feminisme fungsional dalam penelitian ini dijelaskan dalam kegunaan feminisme sebagai gerakan kesetaraan gender dalam aspek fungsional yaitu perempuan di bidang politik. Hadirnya perempuan dalam upaya pemenuhan hak-hak dalam politik yang mengakar dari keterwakilan perempuan di politik (khususnya dibidang parlemen dan pemerintahan) dijamin oleh undang-undang (Jovani, 2017). Sehingga fungsional dalam hal ini merupakan sebuah aspek yang bertujuan untuk mencari keadilan, persamaan, kemanusiaan, dan nilai untuk kebaikan bersama sehingga terbitlah sebuah pengaruh dalam sebuah gerakan untuk memengaruhi pemerintah dalam upaya menghasilkan sebuah nilai yang diinginkan oleh masyarakat (Surbakti, 2010).

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan individu ataupun kelompok yang aktif mengikuti kegiatan perpolitikan dalam memberikan pengaruh seperti menyuarakan suaranya berupa sebuah saran, tanggapan, maupun kritik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah,

memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai maupun menduduki kursi parlemen, dan mengikuti sebuah kegiatan yang berhubungan dengan politik tersebut (Budiardjo, 2008).

Partisipasi politik juga diartikan sebagai warga negara yang ikut serta untuk memberikan sebuah penentuan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Partisipasi politik digambarkan dengan bagaimana para partisipan dalam politik ini memengaruhi para pembuat kebijakan dan memengaruhi pemerintah dalam hal keputusan politik yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara langsung maupun tidak langsung (Surbakti, 2010).

Penggunaan partisipasi politik dalam penelitian ini digambarkan kepada perempuan di Liberia yang keterwakilannya masih rendah. Serta hadirnya *UN Women* membantu perempuan di Liberia dapat menggapai keterwakilan politik karena program-program *UN Women* seperti pendidikan politik dan arus dasar dalam kontribusinya untuk membantu perempuan Liberia dalam Rancangan Undang-Undang agar kuota gender 30% untuk perempuan diterapkan sehingga perempuan dapat meminimalisir sulitnya akses ke dalam politik bagi perempuan Liberia. Partisipasi politik dalam penelitian ini juga didasari oleh parlemen dan partai politik sebagai wadah bagi perempuan Liberia untuk menjangkau keterwakilannya dalam ranah politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan dalam menggambarkan bagaimana tingkah laku manusia dalam menghadapi situasi atau fenomena sosial (Aminuddin, 1998). penelitian kualitatif bertujuan dalam memberikan analisis terkait kegiatan sosial serta perspektif terhadap peristiwa atau fenomena tersebut (Sukmadinata, 2009). Kemudian, penelitian ini memiliki jenis penelitian eksplanatif yang berupaya dalam memberikan arahan terhadap analisis dari sebab-akibat sehingga mendapatkan stabilitas dari prediksi lanjutan yang membuat korelasinya terbukti (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif ini menjelaskan bagaimana *UN Women* memberikan kontribusinya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Liberia. Subjek dalam penelitian ini merupakan *UN Women* selaku organisasi internasional dan aktor non-negara. Sedangkan objek penelitian yang diteliti terletak dari topik inti dari permasalahan ini, yaitu isu pemberdayaan perempuan yang menjadi salah satu faktor *UN Women* membantu negara Liberia untuk meningkatkan partisipasi politik

perempuan dengan melaksanakan program-programnya. Pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data yang diambil diantaranya berdasarkan buku, jurnal, website resmi, laporan tahunan *UN Women*, dokumen yang dipublikasikan secara resmi, media online, dokumen dari pemerintah, serta beberapa karya tulis lainnya untuk menunjang penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Partisipasi Politik Perempuan di Liberia

Partisipasi politik perempuan di Liberia yang rendah merupakan isu penting yang menjadi perhatian bagi mitra internasional dan para pemilik kepentingan pemilihan umum. Salah satu cara agar keberhasilan dalam pembangunan nasional dan perdamaian tetap terjaga adalah partisipasi politik perempuan yang setara. Diskriminasi terhadap perempuan dari badan pembuat keputusan menjadi penghalang kesetaraan gender, pembangunan ekonomi, dan menghilangkan prinsip demokrasi (UNDP, 2021). Pada tahun 2019, Liberia berada pada peringkat ke-156 dari 162 negara pada Indeks Ketimpangan Gender, yang menempatkan perempuan Liberia kurang memiliki kesempatan di setiap sektor (Clayeh, 2022). Pada tahun 2022, Liberia juga berada pada peringkat ke 163 dari 185 negara pada peringkat perempuan di parlemen nasional. Perempuan di Liberia hanya berhasil menempati kurang dari 11% dari total 103 kursi di Badan Legislatif Nasional. Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi kepada perempuan, karena perempuan dan anak di Liberia menempati persentase 50% dari populasi. Dalam pemenuhan partisipasi politik perempuan, Liberia telah mengadopsi kerangka hukum regional dan internasional. Diantaranya adalah CEDAW, *Beijing Declaration and Platform for Action*, Protokol Piagam Afrika. Liberia juga termasuk dalam anggota Uni Afrika, dan diharapkan dapat memperjuangkan prinsip paritas gender. Liberia juga termasuk dalam ECOWAS, yang diharapkan dapat menerapkan protokol demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, kerangka kerja yang strategis, dan melakukan kegiatan rencana aksi gender dalam pemilihan umum (UNDP, 2022). Partisipasi politik perempuan di Liberia terhambat oleh adanya sistem pemilihan *First Past The Post (FPTP)*. Perempuan menjadi sulit untuk mendapatkan surat suara partai yang menyebabkan sulitnya menang dari suara. Diskriminasi terhadap perempuan juga menjadi konteks dalam partisipasi politik

perempuan yang rendah. Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum yang bermakna ganda juga menempatkan ketidakpastian kepada perempuan, karena tidak ada ketentuan gender wajib yang mengharuskan perempuan menempati posisi kuota 30% (UN Women, n.d.).

### **Visi *UN Women* dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan**

*UN Women* merupakan sebuah entitas *United Nations* (PBB) yang dibentuk pada Juli 2010 dengan tujuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sebagai langkah untuk membantu dan mempercepat kemajuan guna menghilangkan diskriminasi yang dialami oleh perempuan. *UN Women* memiliki beberapa fokus utama, salah satunya adalah perempuan memimpin, serta berpartisipasi dan mendapat manfaat yang sama dari sistem pemerintahan. *UN Women* memiliki tujuan dalam meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan dengan melaksanakan program-program mengusung kesetaraan gender yang berkaitan dengan pelatihan dalam memberikan sebuah pembelajaran (pendidikan) yang bertemakan pemberdayaan perempuan di ranah politik, partai politik, dan pemerintah, ditambah dengan mendorong langkah-langkah kesetaraan gender sebagai pusat pembuatan kebijakan publik. *UN Women* juga memberikan pelatihan terhadap kandidat politik perempuan guna menambah kemampuan para perempuan supaya maksimal dalam turut andil dalam berpolitik. Selain itu, *UN Women* juga berupaya untuk masuk ke area legislatif dan konstitusional dalam memperjuangkan perempuan memiliki akses yang adil dalam partisipasi politiknya yang dapat mengikuti kegiatan politik seperti menjadi kandidat, mengikuti pemilihan, pejabat terpilih, dan anggota layanan sipil. *UN Women* tentunya bekerja sama dengan anggota negara PBB dan masyarakat sipil dalam melaksanakan program-programnya supaya pada saat pemilihan umum dapat disertai dengan hak-hak perempuan yang terhindar dari kekerasan pemilihan umum saat melakukan kampanye bebas. Selain itu, *UN Women* juga ingin mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* nomor 5 dengan target kesetaraan gender dalam upaya memastikan keefektifan dan partisipasi penuh perempuan sehingga mendapatkan kesempatan yang sama dalam memimpin dan pengambilan keputusan di ranah politik, publik, dan ekonomi. Partisipasi politik perempuan menjadi sebuah kunci untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mewujudkan demokrasi berkelanjutan untuk masa depan, agar terarah dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif, memiliki penganekaragaman suara yang didengar, dan dapat menempatkan solusi atas kebijakan yang akan berdampak ke setiap kehidupan orang (UN Women, n.d.-b).

## **UN Women dalam Pendidikan Politik Perempuan di Liberia**

Di Liberia, *UN Women* selaku organisasi internasional membuat program-program dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan Liberia. Perempuan di Liberia dibantu oleh *UN Women* dengan didukung oleh *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan Tujuan Pembangunan Global nomor 5 tentang Kesetaraan Gender, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Beijing Platform For Action*. Dukungan tersebut melahirkan sebuah program yang dinamakan dengan *Women's Political Participation and Leadership (WPPL)* yang bertujuan dalam upaya menangani tantangan yang dimiliki oleh perempuan dalam berpolitik sehingga tercapainya partisipasi politik mereka (UN Women, 2021).

Pada tahun 2019, perempuan di 5 partai politik mendapatkan peningkatan pendidikan politik dan kapasitas dalam keterlibatannya terhadap para pemimpin politik berdasarkan hasil dari serangkaian pelatihan yang berupaya memperkuat sayap perempuan dari 5 politik teratas di Badan Legislatif Nasional yang ditandatangani oleh *UN Women* dan *National Democratic Institute (NDI)* di bawah nota kesepahaman pada April 2019. *UN Women* juga mendukung serangkaian pelatihan kepada sebanyak 75 perempuan muda yang berasal dari 15 kabupaten di Liberia yang melibatkan para pemimpin politik dan keterlibatan masyarakat sipil. Program ini diusung dalam tema kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kanada yang diimplementasikan melalui *NAYMOTE Partners for Democratic Development* yang merupakan sebuah lembaga untuk mempromosikan demokrasi, pembangunan perdamaian, hak asasi manusia (HAM) dan keterlibatan sipil di Liberia. *UN Women* juga memimpin rangkaian pelatihan bertajuk "*I Know Gender*" yang melibatkan 5 perempuan dan 15 laki-laki legislator. Rangkaian pelatihan tersebut membahas tentang pengarusutamaan gender, CEDAW, penganggaran yang responsif atas gender agar terciptanya sifat kepemimpinan berbasis kesetaraan gender. Berdasarkan pelatihan tersebut, Anggota legislatif laki-laki dari kedua majelis legislatif berjanji untuk berperan sebagai *HeForShes*, dan menyetujui serta memastikan tinjauan anggaran nasional tahun 2019-2020 yang mengalokasikan dana dengan memprioritaskan gender. Liberia juga merupakan salah satu dari 10 cabang di Afrika yang menempati *African Women Leaders Network (AWLN)*, yang bertujuan dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan perempuan sehingga mencapai pembangunan, perdamaian, dan keamanan (UN Women, 2021).

Pada tahun 2020, *UN Women* memfasilitasi dengan mendampingi perempuan muda yang tertarik atas kepemimpinan politik. Para perempuan muda mendapatkan pendampingan melalui program peningkatan kepemimpinan politik dan keterampilan advokasi yang berupaya untuk mengadvokasi pemberlakuan terhadap perempuan dalam pengadvokasian langkah-langkah khusus sementara. *UN Women* juga memfasilitasi presentasi untuk memberikan pengetahuan terhadap komite legislatif terkait cara, sarana dan keuangan, akun publik, dan juga memberikan informasi terhadap Kaukus Legislatif Perempuan dalam proses penganggaran nasional yang berbasis kesetaraan gender. Hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam memberikan informasi penganggaran nasional yang dianalisis melalui perspektif gender. Pada tahun 2021, sekitar 150 remaja perempuan dari 15 kabupaten di Liberia mendaftarkan diri pada *Young Women Political Leadership and Mentorship Program* yang bertujuan untuk memberikan penguatan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dalam bidang kepemimpinan. Ditambah dengan peluncuran sekolah kepemimpinan politik yang telah memberikan kontribusinya di Kabupaten Bomi dalam pemilihan calon wakil perempuan (UN Women, 2022b).

### ***UN Women dalam Pengusungan Kuota Gender 30% untuk Perempuan di Liberia***

Pada tahun 2020, UN Women memberikan dukungan secara teknis dan keuangan dalam program Women's Political Participation and Leadership (WPPL) yang memiliki upaya dalam pengusulan amandemen Undang-Undang pemilihan umum terkait kewajiban seluruh partai politik untuk pemenuhan kuota gender dalam daftar calon mereka, dan akan mendapatkan sanksi jika melakukan ketidakpatuhan. Amandemen tersebut diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum ke legislatif nasional yang akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang pemilihan umum bagian 4.5. Dialog dan konsultasi juga diselenggarakan oleh African Women Leaders Network (AWLN) Liberia, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan perempuan dari partai politik yang diberikan dukungan secara keuangan dan teknis oleh UN Women (UN Women, 2022b).

Pada tahun 2021, UN Women memberikan kontribusinya dengan berperan dalam peningkatan kesadaran serta penerimaan reformasi yang diusung melalui advokasi kepada anggota parlemen, anggota komite pemilihan dan pelantikan agar meninjau Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan umum. Program tersebut juga memberikan kapasitas

advokasi secara kuat kepada Kaukus Legislatif Perempuan dan Komisi Pemilihan Umum, serta mendukung Kementerian Gender, Anak dan Perlindungan Sosial dalam advokasi yang berupaya menerapkan kuota wajib 30% gender pada daftar kandidat di bagian 4.5 Rancangan Undang-Undang (RUU) (UN Women, 2022a). Berkat kontribusi dan dukungan oleh UN Women untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Liberia, DPR Liberia mengesahkan amandemen Undang-Undang Pemilihan Umum untuk kuota gender 30% perempuan pada Februari 2022 (Gharib, 2022).

### ***UN Women sebagai Fasilitator Politik Perempuan di Liberia***

Pada tahun 2020, UN Women berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas kandidat perempuan dan keterlibatan masyarakat dalam menyediakan platform saluran media agar para perempuan dapat berkampanye dan bertemu dengan orang yang akan memilih mereka. UN Women juga berperan dalam mendukung pengawasan dan pemantauan perempuan di Pemilihan Umum guna mencegah kekerasan terhadap perempuan. UN Women juga mempromosikan Rencana Aksi Nasional Perdamaian dan Keamanan Perempuan kepada partai politik, peradilan dan organisasi masyarakat sipil, dan memastikan bahwa pengimplementasiannya berhasil. UN Women juga memberikan dukungan secara keuangan dan teknis kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Industri, yang membantu dalam mengembangkan kebijakan yang responsif gender yang berisi tentang pengarusutamaan gender dalam kegiatan perencanaan dan pemrograman, mengarusutamakan perencanaan, kebijakan dan penganggaran yang responsif gender, mempromosikan budaya kesetaraan gender dalam pelayanan, memperkuat pengetahuan dalam sektor kementerian agar terciptanya kesetaraan gender yang terarah (UN Women, 2022b). Pada tahun 2021, UN Women memiliki hubungan yang erat terhadap Kementerian Gender, Anak, dan Perlindungan Sosial dalam tujuan konsultasi terhadap pemerintah Liberia. Kementerian tersebut juga memiliki rencana kerja tahunan yang berbiaya untuk tahun kerja 2021-2023. Dalam hal tersebut, UN Women berkontribusi dalam memberikan kontribusi secara teknis dan keuangan guna memberikan arahan yang strategis kepada kementerian (UN Women, 2022a).

## KESIMPULAN

Diskriminasi perempuan masih menjadi isu pemberdayaan perempuan yang masih perlu difokuskan. Budaya patriarki yang masih mendominasi membuat perempuan sulit dalam mengakses kegiatan, pekerjaan, dan haknya dalam terlibat dalam suatu kepentingan. Partisipasi politik perempuan menjadi salah satu langkah awal dalam memajukan pembangunan, perdamaian, dan keamanan bagi negara. Liberia merupakan contoh negara yang mengalami partisipasi politik perempuan yang rendah akibat dari kurangnya pemberdayaan perempuan. Tidak adanya kuota gender 30% untuk perempuan membuat perempuan semakin sulit untuk terjun ke ranah politik, karena pedoman kuota 30% berfungsi untuk memastikan perempuan untuk berada di dalam kerangka kerja politik.

*UN Women* selaku organisasi internasional memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Liberia. Penghargaan yang telah dicapai oleh *UN Women* salah satunya adalah keberhasilan dari amandemen 30% kuota gender untuk perempuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang disahkan oleh DPR. Walaupun masih harus melewati senator dan presiden, namun keberhasilan untuk mencapai tingkat DPR menjadi langkah awal atas keberhasilan yang patut diapresiasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brooks, D. (2021). *Functional Feminism: An Apolitical Guide to Women's Empowerment*. Vervante.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Clayeh, J. H. W. (2022, July 8). *Liberia: Govt, World Bank Sign Women Empowerment Project, and the Covid-19 Preparedness Program Second Financing Agreement*. <https://allafrica.com/stories/202207070204.html>
- Gharib, M. W. (2022, June 10). *Liberia: Strengthening Laws to Institutionalize Women's Political Participation*. <https://allafrica.com/stories/202206110097.html>
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hafez, S., Munyati, B. M., Zeno, K., Gbozee, C. K. Z., Jusu, M., Reeves, M. S., Wesseh, C. S., Wiah, S. O., AlKhalidi, M., Johnson, K., & Subah, M. (2022). Examining the Gender

- Imbalance in the National Community Health Assistant Programme in Liberia: a Qualitative Analysis of Policy and Programme Implementation. *Health Policy and Planning*, czac075. <https://doi.org/10.1093/heapol/czac075>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- IDEA. (2022, September 9). *Gender Quotas Database*. Idea.Int. <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/173/35>
- IPU. (2011a, December 28). *LIBERIA House of Representatives*. [http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2183\\_11.htm](http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2183_11.htm)
- IPU. (2011b, December 28). *LIBERIA The Liberian Senate*. [http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2184\\_11.htm](http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2184_11.htm)
- Jovani, A. (2017). Politik dan Kaum Feminis. *Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik*, 141–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.467>
- Laubach, B. (2021). *Promoting Women's Political Participation: From Quotas to Parity - A Guide to Legal Options for the West and Central Africa Region*.
- Letouzé, E., Spinardi, A. C., Ortiz, S., Nieto, B. F., Arratia, E. M., Golakeh, L., Dukuly, A., & Lekpeh, J. (2021). *LIBERIA Country Gender Equality Profile*.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo.
- UNDP. (2021, July 21). *UNDP Supports Gender Stakeholders' Conference on Women's Political Participation in Liberia*. <https://www.undp.org/liberia/press-releases/undp-supports-gender-stakeholders%E2%80%99-conference-womens-political-participation-liberia>
- UNDP. (2022, August 16). *Towards a More "Equally Equal" Liberia: The Case for a Mandatory Gender Quota*. <https://www.undp.org/liberia/blog/towards-more-equally-equal-liberia-case-mandatory-gender-quota>
- United Nations. (1990). *Resolutions and Decisions of the Economic and Social Council*.
- United Nations. (2012). *Resolution Adopted by the General Assembly on 19 December 2011*.
- UN Women. (n.d.-b). *Women's Leadership and Political Participation*. Retrieved February 14, 2023, from <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation>

UN Women. (2021). *Annual Report Liberia 2019*.

UN Women. (2022a). *Annual Report Liberia 2021*.

UN Women. (2022b). *UN Women Liberia Annual Report 2020*.